

Abstract

The research purpose is to create security model on immovable assets in Sumenep. This research uses qualitative method with soft system methodology approach. The results showed that Sumenep district government in implementing the immovable asset security is not optimal because there is no standard reference, so immovable assets security model is needed. Administrative security model starting from demand the land assets report from the entire agencies accompanied by supporting documents. Furthermore, the report synchronized and verified directly to the assets location. If there are assets that administratively incomplete, than it must performed by legal security that starts from tracking the land assets status, if uncertified assets are found than certification is needed. Certified land assets then followed up through the physical security of land assets that used by the other party or misused by parties who violate the provisions of the land use agreement by fencing/ installing a sign of ownership.

Key words: conceptual model; immovable security; soft system methodology

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun model pengamanan aset tidak bergerak di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *soft system methodology*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Sumenep dalam melaksanakan pengamanan aset tidak bergerak masih belum optimal. Hal ini karena belum ada standar acuan yang jelas, sehingga diperlukan model pengamanan aset tidak bergerak. Model pengamanan administrasi dimulai dari permintaan laporan aset tanah dari seluruh SKPD disertai dokumen pendukung. Selanjutnya laporan tersebut dilakukan sinkronisasi dan verifikasi langsung ke lokasi aset. Jika terdapat aset yang belum lengkap secara administrasi, selanjutnya dilakukan pengamanan hukum yang dimulai dari melacak status aset tanah, apabila ditemukan aset yang belum bersertifikat maka dilakukan pensertifikatan tanah ke BPN. Aset tanah yang bersertifikat kemudian ditindaklanjuti melalui pengamanan fisik terhadap lahan milik pemerintah daerah yang digunakan oleh pihak lain atau disalahgunakan oleh pihak yang melanggar ketentuan perjanjian penggunaan tanah milik pemerintah daerah dengan cara pemagaran atau pemasangan tanda kepemilikan.

Kata-kata kunci: model konseptual; pengamanan aset tidak bergerak; *soft system methodology*